

**SUMMARY REPORT UN WOMEN - AIPA
REGIONAL MEETING ON PROMOTING WOMEN'S – LEADERSHIP &
POLITICAL PARTICIPATION IN ASEAN
Tanggal 7-8 Oktober 2014 di Four Seasons Hotel Jakarta**

Regional Meeting on Promoting Women's Leadership and Political Participation in ASEAN telah diselenggarakan pada tanggal 7-8 Oktober 2014 di Four Seasons Hotel, Jakarta, oleh UN Women bekerjasama dengan ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA). Pertemuan yang dihadiri oleh Anggota Parlemen dari 8 Negara Anggota ASEAN (Thailand dan Brunei Darussalam tidak dapat hadir) serta NGOs dan UN Agency ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan dan strategi terbaik untuk meningkatkan partisipasi perempuan di politik di ASEAN. Pada kesempatan ini, Delegasi DPR RI diwakili oleh 2 (dua) Anggota BKSAP, yakni Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., dan Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.

Pada *opening session*, *Regional Director of UN Women Regional Office for Asia and the Pacific*, Mrs. Roberta Clarke menyatakan bahwa Anggota Parlemen, selain memiliki kekuasaan menyusun legislasi, juga merupakan pemimpin masyarakat yang dapat mendorong kesadaran mereka untuk mengubah ketidaksetaraan gender. Anggota Parlemen dapat mendidik dan menginformasikan masyarakat dan memegang posisi untuk memobilisasi masyarakat agar mengambil aksi positif dalam mengakhiri diskriminasi baik di ruang lingkup publik dan privat serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Jenderal AIPA, Mr. Periowsamy Otharam yang menyatakan bahwa representasi perempuan di setiap Parlemen ASEAN rata-rata kurang dari 30%. Banyak hal yang masih harus dilakukan untuk mendorong perempuan maju untuk melayani masyarakat sebagai pejabat publik. Tugas tersebut harus dilakukan, antara lain, oleh Anggota Parlemen perempuan untuk mendorong perempuan lainnya di kawasan untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Pertemuan terdiri dari beberapa sesi dengan tema dan pembicara sebagai berikut:

Session on Women's Political Participation in ASEAN

Chair: Ms. Roberta Clarke, Regional Director of UN Women Regional Office for Asia and the Pacific

- H.E. Ms. Dato Seri Azalina Othman Said
- Ms. Eva Kusuma Sundari, former MP from Indonesia
- Ms. Thusitha Pilapitiya, UNDP APRC

Session on Strategies, Policies and Programs to Promote Women's Political Participation

Chair: Hons. Madam Normala binti Abdul Samad, MP from Malaysia

- H.E. Ms. Mu Sochua, Parliamentarian from Cambodia
- Hon. Rep. Maria Leonor Gerona Robredo, AFPPD Phillipines
- Ms. Leena Rikkila Tamang, Regional Director Internatioanl IDEA AP

Session on Role of Parliamentarians in Upholding Women's Human Rights and Promoting Gender Equality in the ASEAN

Chair: Prof. Dr. Rashila Hj. Ramli, Director, Institute of Malaysia and International Studies (IKMAS) UKM MALAYSIA and Regional Council Member, APWLD

- Mr. Harry Jenkins AO, former Speaker of the Australian House of Representatives
- H.E. Mr. Nguyen Van Tien, Vice Chairman of PCSA Vietnam

Session on Role of Political Parties in Enhancing Women's leadership

Chair: AIPA

- H.E. Ms. Sun Saphoeun, MP From National Assembly of Cambodia
- Hon. Madam Normala binti Abdul Samad - Parliamentarian from Malaysia

Session on Monitoring and Supporting Women's Political participation in ASEAN

Chair: Hon. Mme. Bandith Phathoumvanh, MP from Lao PDR

- H.E. Ms. Kheng Samvada, MOWA, Cambodia
- Ms. Sherrill Whittington, consultant in gender, governance and peacebuilding

Pertemuan telah berhasil mengidentifikasi beberapa tantangan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di parlemen, yakni:

1. Di sebagian negara, bias budaya dan agama masih tertanam kuat dan menjadi penghalang bagi perempuan untuk memangku jabatan publik;
2. Dalam beberapa konteks, partai politik tidak memasukkan perempuan sebagai calon pejabat publik. Proses ini dapat mencegah perempuan dengan rekam jejak yang baik untuk menjadi pemimpin politik dan memangku jabatan yang lebih tinggi. Ini juga berarti mencegah praktek demokrasi dengan memotong hak rakyat untuk memilih kandidat terbaik melalui suara mereka;
3. Partai politik yang memiliki sayap perempuan atau kaukus perempuan, tidak selalu berhasil memfasilitasi berlakunya undang-undang yang mendorong partisipasi politik perempuan dan melindungi hak asasi perempuan;
4. Kebijakan Partai tersebut dapat membatasi kaukus perempuan dan pemimpin perempuan dalam mengambil langkah-langkah progresif untuk mempromosikan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender;
5. Pemimpin perempuan menghadapi tantangan persepsi tradisional dimana pilihan pejabat publik lebih condong pada pria atau kepribadian yang populer serta tantangan lainnya seperti pembiayaan kampanye;
6. Di beberapa negara, dinasti politik tersebar luas, di mana perempuan dan laki-laki muda hanya utusan yang memastikan bahwa keluarga tetap berkuasa. Kecuali seseorang tersebut bagian dari dinasti politik, akan sulit baginya untuk memasuki, mempengaruhi dan mengubah struktur kekuasaan;
7. Pemimpin perempuan juga berjuang dengan ketidaksetaraan dalam domain publik dan swasta, mencegah mereka untuk menunjukkan potensi penuh mereka sebagai pemimpin. Akibatnya, situasi tersebut menjadi penghalang bagi perempuan lain untuk terlibat dalam politik;
8. Beberapa negara belum mengambil tindakan afirmatif, melalui hukum, mekanisme dan sumber daya, seperti pada anggaran responsif gender, yang dapat mendukung partisipasi dan kesetaraan perempuan di politik;
9. Sangat sedikit sumber daya publik yang dapat diakses oleh pemimpin perempuan untuk membiayai kampanye politik mereka. Selain itu, ada kewajiban untuk menciptakan budaya transparansi dalam pengeluaran pemilu di ASEAN, di mana kampanye biasanya bersumber dari swasta.

Untuk merespon tantangan tersebut diatas, maka peserta pertemuan berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Menggunakan pendekatan berbasis hak asasi (partisipasi perempuan dalam politik sebagai sebuah hak asasi) dalam menyusun kebijakan dan inisiatif nasional dan regional secara konsisten;
2. Menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam memangku jabatan publik. Menggunakan indikator yang strategis dan tepat, pemantauan berkala, evaluasi dan pelaporan kemajuan dalam mengobservasi partisipasi politik perempuan. Melalui proses ini, masyarakat mendapat informasi tentang bagaimana sumber daya negara dihabiskan dan bagaimana hal ini dapat mendorong pemberdayaan dan partisipasi politik perempuan.
3. Membina dialog, kemitraan, kolaborasi dan mekanisme yang dapat mendorong partisipasi masyarakat sipil dan masyarakat, termasuk individu-individu dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam proses kebijakan. Melalui ruang dan mekanisme tersebut, para pemangku kepentingan dapat lebih baik dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan di politik.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk di implementasikan baik di tingkat nasional maupun regional sebagai berikut:

Nasional:

1. Memprioritaskan legislasi yang dapat memfasilitasi partisipasi perempuan di politik, misalnya: sistem kuota dan *gender responsive budgeting*;
2. Melibatkan partai politik dan masyarakat sipil dalam mempromosikan partisipasi perempuan di politik;
3. Mendukung kapasitas kaukus perempuan untuk memberikan intervensi yang substantif dalam memajukan kepemimpinan perempuan di politik, terutama dalam struktur organisasi partai politik;
4. Membangun kemitraan dengan Anggota Parlemen Pria dalam membentuk parlemen yang sensitif gender dan mendorong partisipasi mereka dalam proses pembelajaran mengenai kesetaraan gender;
5. Membimbing pemimpin perempuan muda untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di politik, dengan fokus pada integritas dan kepemimpinan;
6. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kita harus mengadaptasi pendekatan yang holistik untuk memberdayakan perempuan dan mempromosikan perempuan untuk duduk di posisi pemimpin, dengan mengutamakan pada jaminan untuk perempuan dapat mengakses kesehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya;
7. Pemberdayaan perempuan di segala bidang, termasuk jaminan perlindungan dan keamanan terhadap kekerasan;
8. Mendorong pengesahan legislasi dan kebijakan yang mengadvokasi kebutuhan finansial perempuan dalam konteks pemberdayaan perempuan serta kesetaraan gender.

Regional

1. Mendorong *Women Parliamentarians of AIPA* (WAIPA), dengan bekerjasama dengan organisasi terkait lainnya, agar mengupayakan pembangunan kapasitas untuk menjamin legislasi nasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip CEDAW;
2. Mempercepat dialog kawasan selatan-selatan, kerjasama segitiga, serta kemitraan lainnya untuk mendorong partisipasi perempuan di politik;
3. Melaksanakan penelitian mengenai pembiayaan partisipasi perempuan di politik;
4. Mendorong penyusunan mekanisme yang transparan dalam pembiayaan pemilu dan partai politik;
5. Memperkuat kaukus perempuan di masing-masing Parlemen Anggota AIPA.